Gempa

Sambungan hal 1

Presiden memerintahkan Doni Monardo dan Mensos Risma berangkat ke Mamuju," katanya.

Ia menyebutkan, ada empat helikopter yang dikerahkan menuju Mamuju, Sulawesi Barat. "Doni juga langsung menginstruksikan helikopter BNPB menuju lokasi bencana. Ada empat helikopter BNPB dikerahkan," ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, operasional penerbangan masih berjalan normal pascaterjadinya gempa bumi di wilayah Majene, Sulawesi Barat. Namun, seluruh bandara yang terdampak diminta untuk melakukan monitoring secara berkala terkait dengan kondisi operasional penerbangan.

"Seluruh bandar udara terdampak kami minta untuk melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang mengganggu keselamatan penerbangan. Adapun operasi penerbangan di bandara hingga saat ini di laporkan masih berjalan normal," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto di Jakarta, Jumat (15/1).

Dijelaskan Novie bandara yang terdampak gempa, yakni Bandara Tampa Padang (Mamuju) dan Bandar Udara Sumarorong (Mamasa). Namun, secara umum kondisi pegawai serta fasilitas bandara tidak terdapat kendala, hanya kerusakan minor pada beberapa fasilitas di bandar udara dan sedang diperbaiki.

"Kondisi bandara dan navigasi penerbangan masih dapat melayani operasi penerbangan secara normal. Sedangkan untuk Bandara Sumarorong tidak terdapat kerusakan baik fasilitas sisi udara maupun sisi darat. Namun, terdapat keretakan pada sisi gedung tower Mamuju dan saat ini pelayanan navigasi penerbangan masih beroperasi normal dengan status AFIS," jelas Novie. **(Imd/Ati/Ant)-d**

Guguran

Sambungan hal 1

Demikian dikatakan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Dr Hanik Humaida, Jumat (15/1).

BPPTKG mencatat, dalam minggu ini kegempaan Gunung Merapi terjadi 2 kali awan panas guguran (AP), 208 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 803 kali gempa Fase Banyak (MP), 1.056 kali gempa Guguran (RF), 172 kali gempa Hembusan (DG) dan 16 kali gempa Tektonik (TT). "Dalam satu minggu ini guguran lava pijar teramati sebanyak 128 kali dengan jarak luncur maksimal 900 meter arah Barat Daya ke hulu Kali Krasak," ujar Hanik.

Adapun kubah lava baru yang selanjutnya disebut sebagai kubah lava 2021 berada di sektor Barat Daya Gunung Merapi di sekitar tebing Lava-1997. Pada 14 Januari 2021 volume kubah lava terukur sebesar 46.766 m3 dengan laju pertumbuhan sekitar 8.500 m3/hari.

Deformasi Gunung Merapi yang dipantau menggunakan EDM pada minggu ini menunjukkan adanya laju pemendekan jarak sebesar 6 cm/hari. "Dalam dua minggu ini laju pemendekan jarak menunjukkan penurunan yang signifikan," kata Hanik. Sedangkan analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor Barat Daya tanggal 14 Januari terhadap tanggal 7 Januari 2021 menunjukkan adanya perubahan morfologi area puncak karena aktivitas guguran dan perkembangan kubah lava baru.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. **(Dev)-d**

Sanksi

Sambungan hal 1

Sesungguhnya tidak terdapat peraturan spefik yang mengatur tentang penolakan vaksinasi disanksi dipidana. Kecuali hanya berdasarkan penafsiran hukum semata. Paling tidak terdapat dua peraturan yang bisa ditafsirkan. Pertama, ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dinyatakan : barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Ketentuan ini tidak spesifik menyebut vaksinasi, melainkan hanya menyatakan pelaksanaan penanggulangan wabah. Kedua, ketentuan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menegaskan : setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Dari dua UU tersebut, seolah-olah otomatis dapat disanksi pidana. Namun jika ditelisik lebih dalam, misalnya pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan ini tidak terkait dengan soal vaksin, melainkan pelanggaran terhadap kebijakan kekarantinaan yang harus terpenuhi terlebih dahulu dua syarat. Yakni pertama, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kebijakan berupa penerapan karantina wilayah berskala daerah tertentu. Realitasnya pemerintah hanya membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan aneka kebijakan daerah yang tak seragam seperti yang dilakukan saat ini. Kedua, sebenarnya dalam UU Kekarantinaan tindakan yang dapat diberi sanksi pidana adalah ke luar masuk wilayah karantina tanpa izin dan tidak mematuhi atau menghalangi karantina dan menyebabkan kedaruratan kesehatan. Maka pemberian sanksi pidana terhadap UU Kekarantinaan ini harus terpenuhi dahulu dua syarat tersebut dan terbukti adanya sikap perlawanan warga negara atas kebijakan karantina. Jika tak terpenuhi tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) pilihan cara pengobatan terhadap suatu penyakit merupakan hak seseorang. Maka sesungguhnya merupakan hak seseorang untuk divaksin atau tidak. Dari perspektif HAM tidak tepat jika diterapkan sanksi pidana bagi warga negara yang menolak divaksin. Sebab seolah-olah vaksin menjadi kewajiban, padahal vaksinasi merupakan hak dan pilihan seseorang. Maka penerapan sanksi pidana bagi orang yang menolak divaksin tidak akan efektif karena justru akan menimbulkan kesan menakutkan bukan atas dasar kesadaran. Sesungguhnya ada banyak pilihan yang bisa diambil pemerintah dalam upaya agar penduduk tak menolak divaksin. Misal pertama, pemerintah bisa menerapkan model pemberian insentif bagi penduduk yang bersedia divaksin. Kedua, pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan edukasi. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan sangat bermanfaat, dapat menurunkan tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19. Jika kesadaran masyarakat tinggi, maka tak diperlukan lagi penegakan sanksi pidana.Pemerintah Daerah (pemda) dapat mengambil peran dalam upaya penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat akan pentingnya vaksin, guna mencegah penularan Covid-19 melalui pembentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Tentu peraturan tersebut akan efektif, jika tidak mengutamakan pendekatan *repressive* (paksaan dengan sanksi pidana). Melainkan cara *persuasive* dan *preventive* melalui pendekatan kemanusiaan dan kultural.

(Penulis adalah Pengajar Fakultas Hukum dan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Universitas Sebelas Maret Surakarta)-f

UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF

5 KUBE Gulurejo Terima Penguatan Modal

KULONPROGO (KR) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulonprogo menyerahkan bantuan penguatan modal usaha melalui Kredit Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) dari Bank BPD DIY Cabang Wates Unit Galur sebesar Rp 58 juta, kepada lima perwakilan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, dengan total penerima kredit 38 orang.

KR-Asrul Sani

Bupati Sutedjo menyerahkan bantuan Kredit PEDE.

Penyerahan penguatan modal usaha dimaksudkan agar KUBE terus mengembangkan usaha produktif dengan memanfaatkan pembiayaan bunga murah, sehingga dapat mandiri dan lebih bermanfaat.

Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini, semua pihak dituntut memiliki daya juang lebih agar ekonomi keluarga tetap bertahan. Penyaluran kredit usaha tersebut dinilai sangat tepat sebagai upaya agar masing-masing KUBE dapat meningkatkan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan Kredit PEDE, diharapkan KUBE dapat menambah modal, sehingga mampu mandiri dan lebih bermanfaat bagi kelompok maupun masyarakat sekitarnya," kata Sutedjo di sela penyerahan bantuan di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Jumat (15/1).

Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo Yohanes Irianto MSi menjelaskan, salah satu upaya mengurangi kemiskinan melalui program klaster, yaitu bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat.

"Di Kulonprogo, bansos sekaligus pemberdayaan masyarakat karena di dalamnya terdapat pemberdayaan masyarakat dengan menggunkan produk lokal, sehingga uang akan terus berputar di Kulonprogo," ujarnya.

Dikatakan, program ini merupakan salah satu perwujudan penguatan modal bagi KUBE dan Bank BPD DIY menjadi salah satu lembaga perbankan yang menangkap peluang dan mewujudkannya melalui Kredit PEDE bagi pelaku usaha super atau ultra mikro. Saat ini jumlah KUBE sebanyak 643 kelompok. **(Rul)-d**

Awan

Sambungan hal 1

memang cukup berpengaruh terhadap sektor penerbangan, tapi hanya untuk pesawat kecil jenis propeler. Sedangkan pesawat besar seperti yang biasa beroperasi di BIY tidak terlalu berpengaruh," tegasnya.

Warjono mengatakan, awan *Arcus* sangat jarang terjadi. Kalaupun muncul biasanya pagi atau sore hari dengan durasi hitungan jam. "Seperti yang terjadi tadi pagi durasinya berdasarkan radar cuaca dari pukul 07.00-08.20 WIB dan itu hanya melintas saja," ungkapnya.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Kulonprogo Aris Widiatmoko mengatakan, awan tersebut muncul di Pesisir Selatan Kulonprogo sekitar pukul 07.30 WIB. Kemudian semakin mendekati daratan di wilayah Temon dan sekitarnya termasuk area bandara. "Kedatangan awan berwarna keabu-abuan tadi disertai hujan dan angin tapi hanya sebentar. Sekitar pukul 08.00 WIB, awan sudah hilang kemudian kondisi di pesisir cerah," jelasnya membenarkan kemunculan awan 'aneh' tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat, sehingga banyak warga yang mengabadikan momen tersebut baik berupa foto maupun video.

Berdasarkan video yang tersebar di sosial media, beberapa di antaranya menunjukkan kondisi langit di atas BIY. Nampak awan tebal keabu-abuan memanjang dari Barat ke Timur. Sekilas polanya seperti ombak besar.

"Kemunculan awan tersebut sebenarnya sudah diprediksi Badan Meteorologi. Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Informasi dari BMKG sebelum awan itu muncul, ada pergerakan awan dari Laut Selatan DIY dan sebagian wilayah Purworejo menuju ke Utara," ungkap Warjono. **(Rul)-d**

Ilham

Sambungan hal 1

Perkara yang dihadapinya diadukan dengan dua pokok aduan. Pertama ia diadukan dugaan pelanggaran kode etik karena mengantarkan Evi Novida Ginting mendaftarkan gugatan ke PTUN. Evi Novida sempat diberhentikan dari Komisioner KPU. "Dalam persidangan itu telah saya jelaskan secara runtut bahwa pendaftaran gugatan itu dilakukan Bu Evi dan kuasa hukumnya melalui online, e-court, dan itu dilakukan sekitar pukul 07.30 WIB pagi. Kalau tidak salah," kata eks Anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini.

"Sementara saya mendengar kabar Bu Evi dan beberapa kuasanya sedang ada di pengadilan dan saya sampai di pengadilan siang, jelang Salat Jumat. Seingat saya itu," jelas Arief Budiman.

Arief menegaskan, sudah menjelaskan perihal kedatangannya di pengadilan adalah sebagai individu, bukan mewakili KPU. Dirinya juga tidak pernah melakukan perlawanan terhadap DKPP. "Jadi itu sudah saya jelaskan. Kemudian di dalam putusan itu, di dalam pertimbangan putusan disampaikan bahwa ini sebagai bentuk perlawanan KPU kepada DKPP. Saya nyatakan itu tidak benar karena pada hari itu KPU sedang melakukan *work from home*, WFH. Jadi memang kehadiran saya sebagai pribadi," ucap Arief Budiman.

Dijelaskan pula, prinsip leadership harus dilakukan pimpinan ketika ada masalah, ada gangguan, ada peristiwa, yang menimpa anggotanya. Jadi yang dilakukannya bukanlah perlawanan terhadap DKPP.

Komisi II DPR RI akan meminta klarifikasi kepada DKPP. "Kita nanti akan (minta) klarifikasi penjelasan dari DKPP terkait tentang pemberhentian Pak Arief sebagai Ketua KPU," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Ia akan meminta penjelasan kepada DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Arief Budiman. **(Edi)-f**

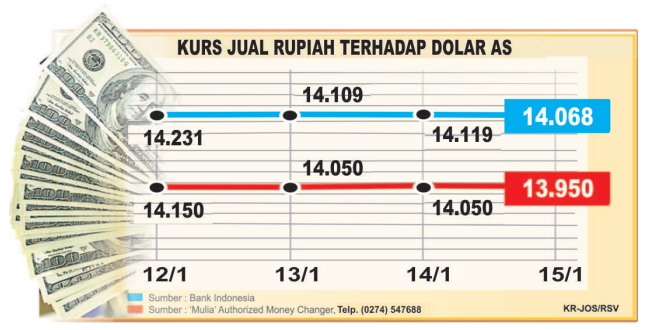

Prakiraan Cuaca — Sabtu, 16 Januari 2021

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

MELATIH INGATAN BERHADIAH

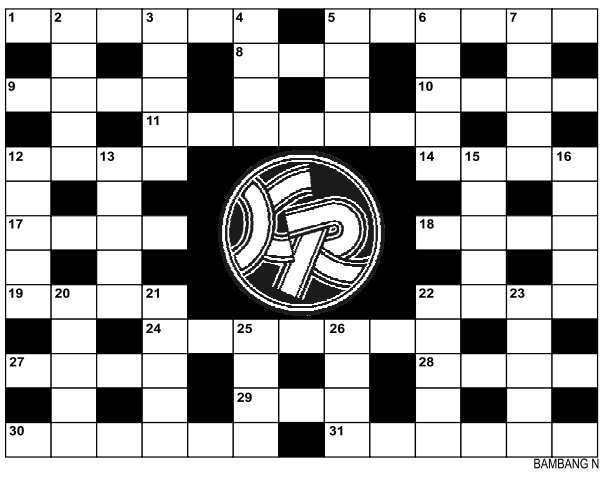

BAMBANG N

PERTANYAAN MI BERHADIAH 4159

MENDATAR : 1.Telak. 5.Penghidupan. 8.Ukuran luas. 9.Bagian benda terkecil. 10.Tertata baik. 11.Acara. 12.Bergerak ke muka. 14.Ruangan lebar di sekolah. 17.Sebelum sekarang. 18.Strategi. 19.Yang diputar di bioskop. 22.Bermalam. 24.Seragam. 27.Saudara suami. 28.Jatah. 29.Daerah Aliran Sungai (singk). 30.Gratis. 31.Langsung bisa digunakan.

MENURUN: 2.Hal yang berlebihan. 3.Alat penerangan. 4.Jenis perahu. 5.Dekat (Ing). 6.Bentuk perusahaan. 7.Kemasan obat suntik. 12.Pola. 13.Kepala karangan. 15.Test. 16.Sengat. 20.Datangkan barang dari LN. 21.Siswa. 22.Lunas. 23.Nomor. 25.Keturunan campuran. 26.Pilihan.

KETENTUAN MENEBAK

1. Jawaban ditulis di kartupos, tempeli Kupon 4159
2. Paling lambat jawaban ditunggu 1 minggu setelah terbitan ini.
3. Akan dipilih 2 pemenang, masing-masing berhadiah Rp 50.000,-

JAWABAN MI 4149

MENDATAR : 1.Agenda. 5.Jelita. 8.Nya. 9.Enam. 10.Plot. 11.Otonomi. 12.Suar. 14.Sais. 17.Lata. 18.Liuk. 19.Sisa. 22.Form. 24.Kendali. 27.Otot. 28.Sama. 29.RRI. 30.Parfum . 31.Maktub.

MENURUN: 2.Gundu. 3.Nomor. 4.Anno. 5.Jago. 6.Lapis. 7.Tropi. 12.Solis. 13.Artis. 15.Animo. 16.Sekam. 20.Intra. 21.Aktif. 22.Fisik. 23.Rambu. 25.Nomr. 26.Alim.

PEMENANG MI 4149

1. ***Munadi,*** *Gampingan Wb 1/697, Rt 44/10, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta 55252.*
2. ***Dra Iryana,*** *Pucang Anom Rt 08/27, Wedomartani, Ngemplak, Sleman 55584.*

KUPON MIB 4159

School from Home, Beban Baru Bagi Para Ibu

Stara Asrita
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

SELAMAT datang 2021 dan kini saatnya kita menyongsong optimisme di tengah pandemi karena negara sudah menjamin adanya vaksin untuk memproteksi diri.

Namun disisi lain tidak sedikit masyarakat yang pesimis dengan adanya vaksin tersebut karena dianggap tidak dapat sepenuhnya mencegah penularan Covid 19.

Di tengah perdebatan yang terjadi, roda kehidupan harus tetap berjalan mulai dari pendidikan, politik, hingga ekonomi. Ekonomi menjadi faktor yang paling berdampak untuk setiap individu, sampai ada istilah lebih baik mati karena Covid 19 daripada harus mati karena kelaparan.

Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk tetap bekerja daripada harus membatasi kegiatan di rumah.

Sektor tenaga kerja merupakan penggerak agar suatu instansi, lembaga atau perusahaan dapat terus berjalan. Hal itu harus diperhatikan negara terutama untuk pekerja perempuan.

Pandemi ini sangat memberatkan perempuan yang bekerja. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan bahwa banyak pekerja perempuan yang mengalami penurunan bahkan harus kehilangan pekerjaan. Salah satu alasan mengapa sebagian perempuan tersebut merelakan pekerjaan adalah karena adanya kebijakan dari sektor pendidikan yaitu "School from Home".

Para Ibu harus mendampingi anak-anak belajar dari rumah. "Kegiatan ini secara tidak langsung menambah beban kerja bagi sebagian Ibu karena tuntutan untuk menjadi garda depan dalam proses pendampingan pembelajaran anak di rumah," kata Ida.

Fenomena ini terjadi tidak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang cenderung membebankan tugas domestik kepada perempuan. Sosok pengganti guru dinilai lebih pas jika diperankan oleh Ibu karena banyaknya stereotip bahwa perempuan lebih bertanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Beban ganda semacam ini sudah dikonstruksi turun temurun sehingga dianggap suatu takdir.

Mendampingi anak sekolah secara daring tidak hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran saja namun tentu saja beban finansial.

Para ibu harus membeli gawai untuk mendukung sistem pendidikan dari rumah. Selain itu, mereka juga harus mengisi kuota internet setiap bulan agar para anak tidak ketinggalan pelajaran.

Di sisi lain, tidak ada penghasilan yang menentu dari ibu ini akibat dari pandemi. Masalah ini begitu rumit dan kompleks bagi perempuan di tengah kondisi yang krisis. Jika hal ini terus berlangsung, perempuan mungkin saja akan menderita gangguan mental dan fisik.Beban berlipat ganda selalu dialami perempuan Indonesia ini terjadi karena struktur patriarki yang kuat di segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu sebaiknya para laki-laki sebagai suami dapat membantu dan bekerjasama untuk menjalankan pendidikan anak-anak mereka. Tidak ada keharusan bahwa pekerjaan rumah tangga hanya dilakukan perempuan. Menurut saya, hidup berkeluarga adalah tanggungjawab bersama tidak hanya satu orang saja. Ketika hal ini dapat diterapkan maka kesetaraan gender dapat diwujudkan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan, terdiskriminasi hingga terpinggirkan.

Namun jika problematika ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan pandemi ini dapat menghapus perjuangan kesetaraan gender yang selama ini sudah dilakukan selama kurang lebih 25 tahun. **(*)**